

## BAB IV

### TANGGUNGJAWAB DEWAN KEAMANAN PBB DALAM PENGENDALIAN NUKLIR DI KOREA UTARA MENURUT TRAKTAT NONPROLIFERASI

#### A. Sejarah Nuklir Korea Utara

##### 1. Sejarah Negara Korea

Korea adalah daerah yang berbatasan langsung dengan Manchuria dan Rusia saat ini. Sejak terpecahnya Korea menjadi dua bagian hingga kini, masalah di daerah Semenanjung Korea adalah masalah internasional yang mempengaruhi Negara-negara di kawasan Asia Timur dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea di wilayah bagian utara yang berhaluan komunis dengan ibukota Pyongyang dan Republik Korea di wilayah selatan yang berhaluan liberal terpisah tepat pada garis lintang utara 38 derajat. Kemudian dikenal sebagai Korea Utara dan Korea Selatan.<sup>34</sup>

Pada awal kedua negara tersebut merdeka, terjadi beberapa masalah yang timbul dan mempengaruhi politik dunia. Misalnya saat setelah merdeka tahun 1948, tepatnya dua tahun sesudahnya yaitu tahun 1950 Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Il-Sung yang telah mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet segera melakukan penyerangan terhadap wilayah Korea Selatan. Akibatnya wilayah Korea Selatan hingga kota Seoul

---

<sup>34</sup> Murtaufiq, Sudarto. "Korea Utara Lakukan Uji Coba Nuklir". [http://www.theglobalreview.com/content\\_detail.php?lang=id&id=247&type=1](http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=247&type=1). Diakses 2 Juni 2009. 10:25.

(ibukota Korea Selatan) dapat dikuasai Korea Utara. Saat itu Korea Selatan tidak memiliki persiapan militer yang memadai sehingga mereka terpaksa mundur dan meninggalkan ibukota. Hal ini memicu PBB untuk melakukan tindakan penyelamatan Korea Selatan.

Terjadinya pemisahan wilayah antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah:

- 1) Perebutan wilayah di semenanjung Korea,
- 2) Adanya unsur politik, ekonomi, dan kebudayaan suatu negara,
- 3) Campur tangan negara Amerika Serikat terhadap konflik kedua negara.

Pada dasarnya, Korea Utara telah menjadi negara sejak tahun 1945, ketika dibebaskan dari Jepang setelah Perang Dunia II. Pada Perang Korea telah berjuang dari 25 Juni 1950 sampai gencatan senjata ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953. Namun, karena Korea Utara dan Korea Selatan masih belum resmi berdamai, belum membicarakan tentang perdamaian secara internasional perang belum resmi berakhir.<sup>35</sup>

Ketegangan antara Utara dan Selatan telah terjadi tinggi pada berbagai kesempatan sejak 1953. Penyebaran dari Angkatan Darat AS Divisi Infanteri Kedua di semenanjung Korea dan kehadiran militer Amerika di Zona Demiliterisasi Korea Utara sebagai penempatan tentara. Di beberapa daerah, Korea Utara dan pasukan Amerika beroperasi di Korea Selatan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

dekat perbatasan ekstrim, yang menambah ketegangan. Ketegangan ini menyebabkan bentrokan perbatasan tahun 1976, yang telah menjadi dikenal sebagai Insiden Axe Murder.

Terjadinya konflik pada tahun 1976 antara Korea Utara dan Korea Selatan mengakibatkan terpecahnya kedua Negara Korea tersebut hingga sekarang. Kemudian secara internasional baru ada pengakuan bahwa berdirinya Negara Korea Selatan dan Korea Utara dalam menentukan kepemimpinan serta menjalankan misi dan visi suatu Negara.

Berkaitan dengan keadaan nuklir kedua Negara tersebut merupakan pengaruh dari mempertahankan sebuah Negara. Keadaan perekonomian, politik dan kebudayaan yang menjadi latar belakang konflik pada suatu Negara. Korea Selatan dan Korea Utara pada prinsipnya adalah Negara yang berkembang secara bersamaan, namun hadirnya Amerika Serikat sering mempengaruhi perbedaan ideologi kedua Negara tersebut.

## **2. Gambaran umum serta motif Pengembangan Nuklir Korea Utara**

### **1. Hal hal yang mempengaruhi pengembangan nuklir Korea Utara**

Sesuai dengan uji coba nuklir Korea Utara, bahwa Negara tersebut pertama mulai mengembangkan teknologi nuklir sejak Thun 1956. Pada awal 1960-an, keamanan di wilayah tersebut dan pemberhentian Soviet ini mempercepat upaya DPRK untuk memperoleh teknologi untuk memproduksi senjata nuklir pada tahun 1960.

Korea Utara membuat perjanjian pertahanan bersama dengan Uni

Soviet dan Cina, namun pemimpin Soviet pada dasarnya tidak mempertimbangkan ketentuan kedua Negara tersebut, kemudian disisi lain Korea Utara juga meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat mengenai nuklir.<sup>36</sup>

Dengan runtuhnya Uni Soviet, pemimpin Korea Utara menjalin hubungan keamanan dalam militer dengan kekuatan besar sejak tahun 1960 dengan tujuan untuk kemandirian di bidang militer. Oleh karena itu pemimpin Korea Utara berusaha untuk menjalin hubungan baru dengan Amerika Serikat, satu-satunya kekuatan cukup kuat untuk melangkah ke dalam kekosongan yang ditinggalkan oleh runtuhnya Uni Soviet.

Kemudian dari awal 1990-an, merupakan krisis nuklir pertama bagi Korea Utara. Korea Utara mencari program non-agresi dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat pada prinsipnya menolak panggilan Korea Utara untuk mengadakan pembicaraan bilateral tentang sebuah pakta non-agresi, dan menyatakan bahwa hanya perundingan enam pihak yang juga termasuk Republik Rakyat Cina, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan yang dapat diterima untuk membicarakan masalah agresi termasuk juga dalam program pengembangan nuklir.

Amerika Serikat menganggap bahwa Korea Utara telah melanggar perjanjian bilateral sebelumnya mengenai tentang pengembangan nuklir, sehingga forum tersebut tidak memiliki akuntabilitas. Sebaliknya, Korea Utara menolak untuk berbicara dalam konteks pembicaraan enam-pihak,

---

<sup>36</sup> Pour, Julius, 2009, *Semenanjung Korea, Warisan Konflik Era Perang Dingin*, Kompas-cetak, Jakarta.

yang menyatakan bahwa itu hanya akan menerima pembicaraan bilateral dengan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses diplomatik antara Amerika Serikat dengan Korea Utara.<sup>37</sup>

Sampai pada tanggal 9 Oktober 2006, pemerintah Korea Utara mengeluarkan pengumuman bahwa Korea Utara telah berhasil melakukan uji coba nuklir untuk pertama kalinya dan tanpa persetujuan Amerika Serikat maupun PBB. Kemudian Pada 19 November 2006 Korea Utara menyatakan bahwa Korea Selatan juga telah membangun senjata untuk menyerang Negara Korea Selatan, kemudian mengklaim militer Korea Selatan secara terbuka pengembangan senjata tersebut untuk target Korea Utara.

Korea Utara menganggap bahwa Korea Selatan bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk menyudutkan Korea Utara dari segi militer dan politik, tuduhan yang sering dibuat oleh Korea Utara pada kenyataannya disangkal oleh Amerika Serikat. Pada bulan Mei Tahun 2009, Korea melakukan tes kedua senjata nuklir di lokasi yang sama dengan tes asli (tidak dikonfirmasi). Uji senjata besarnya sama dengan bom atom dijatuhkan di Jepang dalam Perang Dunia II.

Dari pernyataan tersebut, bahwa dapat diketahui yang menjadi motivasi Korea Utara dalam pengembangan dan uji coba nuklir adalah:

- 1) Adanya anggapan bahwa Korea Selatan telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pengembangan nuklir serta

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

- militer untuk serangan ke utara,
- 2) Adanya rasa kekhawatiran Korea Utara dalam perang saudara,
  - 3) Pembuatan nuklir untuk tujuanantisipasi dibidang militer dan politik luar negeri Amerika Serikat,
  - 4) Untuk tujuan pertahanan keamanan Negara Korea Utara.

Kemudian, adapun motif utama pengembangan Nuklir di Korea Utara adalah sebagai berikut:

- a. *Motive Regime Survival*, yaitu untuk Kelangsungan Rezim yang dikarenakan meredanya Perang Korea (1953) dengan Gencatan Senjata, bukan Perjanjian Damai,
- b. Motif Ekonomi, Program nuklir sebagai instrumen untuk memeras negara-negara disekitarnya memberikan bantuan ekonomi,
- c. Motif untuk mengangkat Status Politik Korea Utara dimata Dunia,
- d. Motif bidang militer untuk tujuan keamanan.

## 2. Kepentingan serta Posisi Amerika Serikat dan PBB dalam Nuklir Korea Utara

Amerika Serikat sebagai negara super power mengklaim bahwa nuklir Korea Utara ini sebagai hal yang sangat mengganggu bagi kestabilan kawasan Asia Timur khususnya dan bagi dunia pada

umumnya. Nuklir Korea Utara pada dasarnya telah membuat Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam pengaturan serta perjanjian dalam pengendalian nuklir di kawasan asia.

Begitu juga dengan ketentuan PBB yang mempunyai kewenangan dalam pemberian sanksi terhadap pengembangan serta uji coba nuklir Korea Utara. PBB menyatakan bahwa nuklir Korea Utara dapat mengganggu keamanan wilayah Asia Timur serta dapat mempengaruhi perdamaian dunia khususnya antar Negara yaitu Negara Amerika Serikat, Korea Selatan dan Korea Utara.<sup>38</sup>

Dalam menghadapi nuklir Korea Utara, posisi kepentingan dasar Amerika Serikat dan PBB adalah:

- 1) Penyelesaian secara diplomasi tanpa mengesampingkan opsi militer. Bukan lagi soft diplomasi melainkan posisi AS sebagai negara adidaya patut diperhitungkan dengan melakukan berbagai diplomasi koersif guna peredaman nuklir Korea Utara.
- 2) Amerika Serikat menginginkan pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat direvisi dan kemudian dimusnahkan melalui perundingan multilateral.
- 3) PBB melakukan evaluasi pengaturan secara internasional mengenai pengembangan nuklir Korea Utara agar dapat di hentikan.

---

<sup>38</sup> KOMPAS.com. "Korea Utara Lancarkan Uji Coba Nuklir Kedua". Senin, 25 Mei 2009. <http://internasional.kompas.com/>. Diakses 2 Juni 2009. 12:30.

Sebagai upaya Amerika Serikat dan sekutunya terhadap penanggulangan nuklir dan pengaruh ekonomi di Korea Utara, maka Amerika Serikat bersedia memberikan bantuan ekonomi ke Korea Utara. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Korea Utara lebih dahulu menghentikan program nuklirnya baru kemudian konsesi ekonomi diberikan,
- 2) Melakukan perundingan damai terhadap pengembangan nuklir,
- 3) Melakukan proses mediasi internasional terkait masalah keamanan Negara Korea.

Salah satu tujuan PBB dan Amerika Serikat dalam menghambat kepemilikan senjata nuklir Korea Utara adalah untuk:

- 1) Mencegah proliferasi senjata nuklir.,
- 2) menghapus ancaman terhadap Amerika Serikat.
- 3) Mengindari Konflik Negara antara Korea Selatan, Korea Utara dan Amerika.

Konsep gagasan Amerika Serikat untuk non-proliferasi nuklir terus meningkat sampai termasuk pencegahan penyebarluasan senjata pemusnah massal WMD (*weapons of mass destruction*) khususnya di wilayah Korea. Setelah serangan 11 September di Amerika dan perang terhadap teror menjadi prioritas, pencegahan proliferasi WMD menjadi isu penting dalam agenda keamanan nasional Amerika Serikat. Yaitu,



dengan ketentuan jika senjata nuklir atau senjata bio kimia terus berkembang disebuah Negara yang rawan konflik, mereka akan menjadi ancaman keamanan dunia.<sup>39</sup>

Dalam kepentingannya terhadap keamanan dan militer sebuah Negara, tentunya Amerika Serikat masih punya power dalam rangka penghentian nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Sebagai negara adikuasa Amerika Serikat memiliki hegemoni yang sangat kuat di Kawasan Asia timur negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korsel merupakan beberapa negara yang memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat.

Negara kawasan Asia, khususnya Korea adalah kunci dalam kawasan Asia Timur yang merupakan negara yang militernya dikuasai oleh Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui bahwa negara-negara dikawasan Asia timur secara tidak langsung bergantung dengan negara seperti Korea dan Jepang. Negara Korea Utara yang masyarakatnya belum sepenuhnya sejahtera juga masih mendapat bantuan ekonomi dari negara tetangga seperti Korea Selatan ataupun Jepang.

---

<sup>39</sup> Yang Seun-Yoon dan Nur Aini Setiawati, *Sejarah Korea*, Gajah Mada University Press, 2003, hlm. 189.

## **B. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Pengembangan dan Pengendalian Nuklir Di Korea Utara**

### 1. Dampak Bagi Asia Timur

Dampak nuklir Korea Utara dapat dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya adalah:

2. Keamanan regional,
3. Proliferasi, dan
4. Rezim nonproliferasi nuklir.

Di kawasan Asia Timur, pengembangan nuklir Korea Utara akan meningkatkan ketidakpastian keamanan. Ketidakpastian tersebut akan menimbulkan perkembangan yang tidak dapat diprediksi sehingga strategi penangkalan juga tidak berhasil terutama dalam situasi krisis.<sup>40</sup>

Selain itu, terdapat empat variabel penyusun struktur esensial kompleksitas keamanan regional di Asia Timur diantaranya adalah Batas wilayah, yang membedakan kompleksitas keamanan regional dari negara-negara sekitarnya yang Secara geografis, kawasan Asia Timur didefinisikan sebagai negara-negara yang terletak di bagian timur laut Asia, yang terdiri dari:

- 1) Cina,
- 2) Jepang,
- 3) KoreaUtara dan

---

<sup>40</sup> Chung-in Moon and Sangkeun Lee, *Military Spending and The Arms Race on The Korean Peninsula, Asian Perspective*, Vol. 33, No. 4, 2009, hlm. 90.

#### 4) Korea Selatan.

Dampak terhadap Asia Timur adalah terhadap ke empat Negara tersebut. Definisi kawasan dalam kerangka keamanan memisahkan keempat negara ini dengan negara-negara kawasan lain karena unsur interdependensi keamanan ditemukan dalam keempat negara ini sangat berkaitan erat dengan perkembangan nuklir Korea Utara.<sup>41</sup>

Pengembangan nuklir Korea Utara dapat berdampak luas bagi stabilitas keamanan regional Asia Timur. Dampak dari pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat juga menimbulkan perlombaan senjata nuklir diantara Negara tetangga khususnya Asia Timur. Perlombaan senjata seperti itu dapat melibatkan perluasan kapabilitas di antara negara-negara bersenjata nuklir misalnya Amerika Serikat, Cina, dan Rusia, atau meningkatkan ketertarikan nuklir di antara negara-negara yang belum bersenjata nuklir misalnya Jepang dan Korea Selatan serta Negara-negara lain yang berada di Asia.

Dari apa yang terjadi di negara-negara Asia Timur, pengembangan senjata nuklir Korea Utara telah membuat kawasan Asia Timur semakin kompleks dan tidak menentu. Pengembangan nuklir tersebut menimbulkan reaksi berantai yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Timur. Bahkan bila uji coba dan atau penempatan nuklir Korea Utara tidak membuat Jepang, Korea Selatan, ataupun Taiwan untuk menjadi negara

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

nuklir, namun dapat mengakibatkan perlombaan senjata konvensional di Asia Timur.

Selain itu, pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat membuat aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan ataupun Jepang semakin kuat. Mereka juga akan cenderung mempererat komitmen untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan bahkan mungkin peningkatan teknologi militer guna menangkal nuklir Korea Utara.<sup>42</sup>

## 2. Dampak Bagi Keamanan Dunia

Adanya pengembangan serta uji coba nuklir Korea Utara, mengakibatkan stabilitas militer dan keamanan dunia berpengaruh, misalnya Korea Selatan dan Amerika Serikat yang memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan bagi Korea Utara.

Adapun dampak yang terjadi pada keamanan dunia mengenai tentang pengembangan serta uji coba nuklir Korea Utara adalah:

- a) Meningkatnya ketegangan Korea Selatan serta terhadap ancaman Korea Utara terkait tentang nuklirnya,
- b) Menyebabkan kekhawatiran Negara-Negara Asia jika terjadi perang antara Korea Selatan dengan Korea Utara,
- c) Adanya kecaman oleh Amerika Serikat tentang nuklir Korea Utara,
- d) Adanya gangguan terhadap diplomasi kebudayaan dan kepentingan nasional Korea Selatan terhadap Negara Negara di dunia.

---

<sup>42</sup> Gu Guoliang, *Missile Proliferation and Missile Defence in North-East Asia, North-East Asia Security*, (Disarmament Forum, 2005), hlm. 38.

## 2. Dasar Pengembangan Serta Uji Coba Nuklir di Korea Utara

### a. Faktor-faktor penyebab pengembangan nuklir

Salah satu yang menjadi dasar pengembangan senjata nuklir Korea Utara adalah karena ketakutan akan adanya ancaman dari negara-negara di kawasan Asia Timur yang melakukan pembangunan militer. Sebagaimana diketahui bahwa Amerika Serikat serta sekutunya di kawasan Asia Timur telah serta merta memberikan sanksi dalam waktu yang cukup lama yang akibatnya telah menimbulkan permasalahan utama dibidang ekonomi yang cukup serius yang hingga saat ini masih diderita oleh Korea Utara.<sup>43</sup>

Tentu saja hal tersebut menyebabkan krisis di bidang ekonomi dan militer Korea Utara di tambah tekanan perseteruan Korea Utara dengan Korea Selatan yang di dukung oleh Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan ketakutan Korea Utara terhadap politik dan militer Amerika Serikat.

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa Korea Utara secara tertekan mendapat ancaman politik dari Amerika Serikat Korea Selatan yang menyebabkan rezim serta pemerintahan Korea Utara dengan inisiatif untuk mengembangkan teknologi nuklirnya, meski tidak dapat persetujuan oleh PBB dan Amerika Serikat.

Dasar Pengembangan serta uji Coba nuklir Korea Utara adalah:

---

<sup>43</sup> *East Asian Strategic Review 2003*, (Tokyo: The National Institute for Defense Studies, 2000), hlm. 125.

1. Untuk mempertahankan kepentingan nasional, politik serta ekonomi Korea Utara,
2. Untuk kepentingan Militer dalam mempertahankan keamanan Negara,
3. Untuk menghindari dan antisipasi terhadap aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan,
4. Untuk tujuan perdamaian.

Selain itu dari segi internal ataupun domestik, Korea Utara memiliki ideologi *juche* yang menekankan untuk berdiri sendiri dan tidak tergantung dengan negara lain serta mengedepankan militer sebagai strategi pertahanan diri. Sedangkan dari segi eksternal, Korea Utara merasa bahwa aliansi pertahanan Amerika Serikat dengan Jepang dan Korea Utara merupakan aliansi yang dapat mengancam keberadaan Korea Utara di kawasan tersebut.<sup>44</sup>

Korea Utara juga tidak dapat mempercayai Cina sepenuhnya sebagai sekutu dikarenakan Cina memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang dominan di kawasan Asia Timur. Oleh sebab itu pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara ini merupakan sebuah aksi-reaksi yang dilakukan masing-masing Negara Asia Timur untuk mempertahankan kepentingan nasional. Ketidakmampuan Korea Utara meningkatkan kapabilitas tempurnya disebabkan oleh kondisi perekonomian yang buruk.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Dengan memiliki senjata nuklir, Korea Utara berusaha mengisi kekurangan kapabilitas persenjataan konvensionalnya tersebut. Sementara alasan politis lebih dilandasi kepentingan untuk menaikkan posisi tawar (*bargaining position*) Korea Utara di level internasional. Ini berkaitan dengan sikap komunitas internasional yang mengasingkan dan bersikap keras terhadap Korea Utara.

Senjata nuklir akan digunakan untuk menekan komunitas internasional agar melibatkan Korea Utara di dalam percaturan global. Selain juga untuk memajukan kepentingan-kepentingan Korea Utara seperti mencabut sanksi keuangan internasional yang diterimanya. Berbagai usaha pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat dikatakan karena tidak adanya jaminan keamanan. Dalam hal ini, program nuklir Korea Utara menjadi sebuah sistem pendukung yang fleksibel bagi Korea Utara dalam mempertahankan rezimnya.

Korea Utara tidak pernah puas akan perjanjian-perjanjiannya dengan Amerika Serikat, bahkan sebaliknya Korea Utara memandang kebijakan Amerika Serikat sebagai sikap permusuhan dan bermaksud untuk menjatuhkan rezim Korea Utara.<sup>45</sup>

Faktor-faktor internal dan eksternal yang membuat Korea Utara merasa perlu untuk terus membangun kekuatan militer dan mengembangkan senjata nuklir ini mempengaruhi keamanan di

---

<sup>45</sup> Kim, Masayuki Tadokoro, and Brian Bridges, "Managing another North Korea Crisis, South Korean, Japanese, and US approaches," *Asian Perspective*, The Institute for Far Eastern, Studies, Kyungnam university, Seoul, Korea. Vol. 27 no. 3, 2003. hlm. 57-58.

kawasan Asia Timur yang kompleks menjadi semakin tidak menentu. Masing-masing negara merasa semakin perlu untuk mempertahankan diri dari ancaman luar. Hal ini membuat kawasan Asia Timur lebih mengarah kepada suasana permusuhan daripada persahabatan.

Adanya Amerika Serikat yang beraliansi dengan Jepang dan Korea Utara yang menyebabkan kecurigaan di kawasan meningkat. Isu proliferasi senjata pemusnah masal masih akan menjadi perhatian utama bagi keamanan kawasan Asia Timur pada tahun-tahun mendatang. Invasi Amerika Serikat terhadap Korea telah menunjukkan bahwa beberapa negara telah disiapkan untuk menyetujui penggunaan kekerasan guna menghentikan pengembangan nuklir ataupun senjata pemusnah masal. Namun invasi yang mungkin akan dilakukan terhadap Korea Utara dengan tujuan perubahan rezim akan lebih sulit dilakukan.

Pada kenyataannya bahwa Amerika Serikat untuk menurunkan rezim Korea serta mempengaruhi politik Korea Utara menimbulkan masalah-masalah baru termasuk persetujuan antara Korea Utara dengan Korea Selatan adalah merupakan bagian dari politik luar negeri Amerika Serikat.<sup>46</sup>

#### b. Alasan Korea Utara dalam Pengembangan serta uji coba nuklir

Pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara pada dasarnya memiliki alasan-alasan tertentu, dasar alasan tersebut diantaranya

---

<sup>46</sup> *Ibid.*



adalah:

- 1) Untuk menjaga keamanan rezim Korea Utara.

Pada umumnya, Korea Utara menganggap Amerika Serikat sebagai ancaman utama. Amerika Serikat juga mengawasi Korea Utara sebagai negara pendukung teroris. Dengan melihat hasil perang di Afganistan dan Irak, Korea Utara mengkhawatirkan bahwa pihaknya akan bisa juga menjadi sasaran berikut dalam daftar gempuran Amerika Serikat. Oleh karena itu, Korea Utara menaruh perhatian pada pengembangan senjata nuklir dengan harapan bahwa nuklir itu akan mencegah Amerika Serikat tidak melakukan aksi provokasi militer terhadap Korea Utara.<sup>47</sup>

- 2). Alasan kedua adalah bahwa kepemilikan senjata nuklir membuat Korea Utara memiliki posisi unggul dalam negosiasi.

Keamanan rezim Korea Utara bisa dicapai sempurna melalui perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, menurut pandangan Korea Utara, dengan memiliki senjata nuklir akan meningkatkan motivasi Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan dengan

---

<sup>47</sup> Gregory J. Moore, *How North Korea Threatens China's Interests*, Understanding Chinese 'duplicity' on the North Korean Nuclear Issue", *International Relations of the Asia Pacific*, Volume 8, 2008, hlm. 2-3.

Korea Utara.

Tidak hanya Korea Utara yang memiliki alasan untuk tetap mengembangkan nuklirnya. Amerika pun memiliki alasan untuk mencegah Korea Utara dalam mengembangkan nuklirnya. Alasan pertama Amerika Serikat adalah:

1. Menghapus ancaman nuklir Korea Utara terhadap negaranya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Korea Utara memiliki Rudal jarak jauh yang daya jangkauannya bisa mencapai dan menghancurkan Amerika Serikat.
2. Untuk menghapus pengembangan nuklir yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan Negara tersebut.

Akibat yang mungkin ditimbulkan oleh pengembangan nuklir Korea Utara selain mengancam keamanan negara lain, juga berakibat pada lingkungan internasional. Jika pengembangan nuklir tetap dilakukan, maka dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa manusia secara internasional. Apabila tenaga nuklir tersebut digunakan sebagai reaktor nuklir ataupun senjata nuklir, maka jika terjadi kebocoran atau kecelakaan akan menimbulkan radiasi serta kerusakan lingkungan hidup yang berakibat langsung dan juga tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, dan dampak radiasi bisa saja baru terlihat setelah berpuluh-puluh tahun setelah terjadinya kecelakaan tersebut.

## C. Sikap Serta Upaya Hukum Internasional Yang Dilakukan Oleh Dewan Keamanan PBB Terkait Dengan Pengendalian Nuklir Di Korea Utara

### 1. Sikap dan Respon PBB serta Amerika Serikat

Melihat kenyataan dalam uji coba serta pengembangan nuklir Korea Utara, maka sikap PBB terhadap Korea Utara adalah terwujud dalam pemberian sanksi serta mengatur dan mengawasi stabilitas keamanan nuklir Korea Utara. PBB yang memiliki dewan keamanan mengutus dewan keamanan untuk mengatasi permasalahan nuklir di Korea Utara dengan melakukan berbagai rundingan terhadap Negara-negara yang memiliki kepentingan, misalnya Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara.<sup>48</sup>

Berbagai upaya diplomasi juga dilakukan oleh PBB dan AS dalam upaya pencegahan nuklir di Korea Utara. Amerika Serikat yakin bahwa Korea Utara adalah negara yang tidak bisa dipercayai, karena mereka selanjutnya mengembangkan program nuklir secara rahasia bahkan setelah pengumuman perjanjian Jenewa. Oleh karena itu, Washington tidak mau melanjutkan negosiasi kalau Korea Utara tidak terlebih dahulu menghentikan program nuklirnya. Amerika Serikat beserta PBB juga mengharapkan bahwa proses dan program nuklir Korea utara harus dibahas di dalam kerangka multilateral yakni dalam pertemuan segi 6 (segi enam).

---

<sup>48</sup> Colombis, A. Theodore, Wolfe, dan James H. 1990. *Pengantar Hubungan Internasional, Kedaulatan dan power*, Jakarta, CV. Abardin.

Pembahasan program nukli Korea Utara sebagai sikap dan respon PBB dan Amerika Serikat bertujuan untuk:

- a. Menghentikan pengembangan nuklir Korea Utara yang dilakukan secara rahasia,
- b. Memberikan sanksi internasional, jika Korea Utara melanggar perjanjian proliferasi nuklir,
- c. Menghindari ancaman nuklir suatu Negara.

## **2. Respon Korea Selatan Terhadap Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara**

Korea Selatan sebagai negara terdekat dan adanya kepemilikan ikatan sejarah yang sangat kuat dengan Korea Utara, yang kemudian adanya persetujuan mengenai kemiliteran yang di dukung oleh Amerika Serikat, maka program nuklir dari paling banyak mempengaruhi dan mengancam Korea Selatan.<sup>49</sup>

Korea Selatan pada dasarnya akan menghindari Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953 yang menelan banyak korban dan kepentingan kedua Negara tersebut. Oleh sebab itu, setiap kemajuan yang dilakukan Korea Utara terutama yang berkaitan dengan persenjataan nuklir maupun militer pasti akan mempengaruhi kebijakan serta tindakan Korea Selatan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

Dalam merespon ancaman nuklir Korea Utara, Korea Selatan melakukan tiga sikap, diantaranya:

1. Meminta jaminan payung nuklir dari Amerika Serikat, dengan mempererat kerangka kerja aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan,
2. Meningkatkan kapabilitas pertahanan konvensional. Namun setiap tahun, ketika Korea Selatan merasa bahwa program nuklir Korea Utara mengalami kemajuan, maka Korea Selatan perlahan-lahan mulai memperhitungkan untuk mengembangkan program misil dan nuklir,
3. Mengajukan rekomendasi terhadap dewan keamanan PBB terhadap ancaman nuklir Korea Utara.

#### **4. Upaya Diplomasi PBB, Amerika Serikat dan Korea Selatan**

Upaya diplomasi telah dilakukan oleh AS dan PBB yang didukung langsung oleh Korea Selatan dalam berbagai perundingan yang dilakukan oleh Amerika Serikat agar Korea Utara melakukan penghentian uji coba Nuklir, namun pada tahun 2009 yang lalu Korea Utara tetap melakukan uji coba nuklirnya.<sup>50</sup>

Korea utara melakukan tindakan diluar perjanjian nuklir kemudian juga keluar dari keanggotaan IAEA (*international Atomic Energy*

---

<sup>50</sup> Hendarsah, Amir. 2007. *Macan Asia Musuh Amerika*, Yogyakarta, Penerbit Galangpress.

*Agency*), yang merupakan organisasi sebagai pengawas dan pemeriksa nuklir pada negara-negara. Kemudian berbagai sanksi tegas yang dilakukan oleh PBB dengan mengeluarkan berbagai bentuk resolusi juga tidak mempengaruhi tindakan Korea Utara untuk melakukan uji coba serta pengembangan nuklir tersebut.<sup>51</sup>

Upaya diplomasi Koersif yang dilakukan Amerika Serikat merupakan bentuk ancaman dari Amerika Serikat dan PBB guna untuk melakukan penghentian program nuklir tersebut. Upaya ancaman ekonomi sempat digulirkan oleh Amerika Serikat, yaitu pemberhentian bantuan ekonomi terhadap Korea Utara. Sebagaimana diketahui Korea Utara merupakan negara yang sangat miskin. Dan memiliki ketergantungan terhadap Negara-negara maju.

Upaya diplomasi yang dilakukan oleh PBB dan Amerika Serikat terhadap Korea Utara adalah:

1. Melakukan diplomasi dibidang ekonomi, untuk mengalihkan program nuklir Korea Utara,
2. Diplomasi dibidang kebudayaan dan militer,
3. Konsep kepentingan nasional yang berkaitan dengan keamanan Negara.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Dengan melihat upaya diplomasi Amerika Serikat terhadap Korea Utara, maka dapat diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki persepsi dalam hubungannya dengan Korea Utara khususnya yang berkaitan dengan nuklir dan militer.<sup>52</sup> Berikut ini adalah persepsi Amerika Serikat terhadap Korea Utara:

- 1) Tidak simpatiknya Amerika Serikat terhadap rezim Korea Utara membuat tidak percayanya terhadap Korea Utara serta pemimpinnya.
- 2) Amerika Serikat menganggap Korea Utara sebagai salah satu rezim yang memiliki senjata pemusnah masal.
- 3) Aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan haruslah dipelihara sebagai alat untuk menangkal Korea Utara dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea.
- 4) Persepsi yang keempat adalah pemerintahan Amerika telah bersikap naif dalam mengadakan kesepakatan 1994 yang menganggap sebagai aksi suap terhadap Korea Utara.

Selain upaya diplomasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan PBB, kemudian Jepang juga melakukan diplomasi terhadap Korea Utara yang telah diadakan pada tanggal 17 September 2002 dan merupakan bagian dari proses CBM sebagai usaha Jepang untuk menciptakan saling

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

percaya, saling pengertian dalam masalah pertahanan dan keamanan masing-masing negara.<sup>53</sup>

Diplomasi antara Jepang dengan Korea Utara tersebut bertujuan untuk:

- 1) Mengajak Korea Utara untuk bertindak secara tegas sebagai anggota komunitas internasional yang peduli mengenai isu-isu keamanan seperti misil dan senjata nuklir serta menyelesaikan dialog antara Amerika Serikat, Korea Selatan dan negara-negara lainnya yang berkeinginan untuk mengurangi ketegangan yang ada di semenanjung Korea.
- 2) Merundingkan tentang keamanan masyarakat internasional terhadap ancaman nuklir,
- 3) Untuk mempromosikan dialog antara negara-negara yang terlibat perjanjian internasional yang berhubungan dengan masalah nuklir Korea Utara.

Pada kenyataannya, bahwa Jepang mampu melihat situasi Korea Utara berdasarkan sudut pandangnya yakni kelemahan Korea Utara di bidang ekonomi serta kekuatan militer. Dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki Jepang serta kelemahan dalam bidang militer akan selalu mempengaruhi Korea Utara untuk melakukan pengembangan nuklir.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> <http://witnyvirgiany.blogspot.com/2009/10/implikasi-perkembangan-senjata-nuklir.html>

<sup>54</sup> [http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea\\_nuclear/faq\\_02.htm](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_02.htm).



#### **4. Sanksi Kebijakan Dewan Keamanan PBB Terhadap Pengembangan serta Uji Coba Nuklir Korea Utara**

##### **a. Sanksi PBB Sebagai Wujud Tanggung jawab Dewan Keamanan**

Dalam menghentikan pengembangan serta upaya uji coba nuklir Korea utara, maka PBB beserta dewan keamanan sebagai organisasi dunia yang memiliki kewenangan serta ketentuan dalam perdamaian dan kewanman dunia, secara hukum maupun perjanjian Internasional PBB memberikan sanksi terhadap Korea Utara.

Bentuk larangan yang di berikan kepada negara Korea Utara atas tindakannya dalam pengembangan dan uji coba nuklir Korea Utara secara tersembunyi adalah:

- 1) Melarang penjualan nuklir dan pertukaran teknologinya dengan Korea Utara, termasuk embargo persenjataan,
- 2) PBB juga melarang transaksi dagang dengan sejumlah perusahaan Korea Utara, membekukan aset dan larangan bepergian untuk sejumlah individu Korea Utara,
- 3) Melakukan pembebanan terhadap Korea Utara atas dampak uji coba nuklirnya.

Setelah proses pengambilan keputusan dan pengenaan sanksi, akhirnya Dewan Keamanan PBB memilih dengan suara bulat untuk menerapkan sanksi terhadap Korea Utara karena klaimnya yang menyatakan bahwa negara itu telah melakukan uji coba nuklirnya secara

ilegal. Resolusi 1718 menerapkan sanksi senjata dan keuangan namun tidak didukung oleh ancaman militer.

Resolusi tersebut pada intinya berisi:

- 1) Menuntut Korea Utara untuk menghancurkan semua senjata nuklirnya, senjata pemusnah massal dan rudal-rudal balistik.
- 2) Mengharuskan semua negara anggota PBB mencegah penjualan atau pemindahan bahan-bahan terkait dengan program-program senjata yang tidak konvensional, juga termasuk peralatan militer seperti tank-tank, rudal dan helikopter.
- 3) Menuntut agar semua negara membekukan rekening orang-orang atau berbagai perusahaan yang memiliki kaitan dengan program nuklir dan balistik Korea Utara.
- 4) Membolehkan berbagai negara memeriksa kargo yang masuk dan keluar dari Korea Utara untuk mencari senjata-senjata yang tidak konvensional.
- 5) Resolusi ini tidak mencantumkan ancaman penggunaan militer.
- 6) Seruan bagi Korea Utara agar kembali, "tanpa syarat", ke meja perundingan dalam pertemuan enam negara yang membahas program nuklirnya.

#### **b. Kebijakan PBB Terhadap pengembangan nuklir Korea Utara**

Selain sanksi dalam resolusi, maka PBB juga mengeluarkan kebijakan sebagai wujud tanggungjawab yang berkaitan dengan pengembangan serta uji coba nuklir Korea Utara. Persepsi dalam kebijakan tersebut menghasilkan tiga elemen utama kebijakan, yaitu:<sup>55</sup>

1. Pejabat resmi dari PBB termasuk dewan keamanan melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap nuklir Korea Utara,
2. Tidak ada negosiasi dengan Korea Utara sampai negara tersebut menghentikan program nuklirnya,
3. Membentuk koalisi internasional untuk menekan Korea Utara agar menghentikan program nuklirnya. Jepang dan Korea Selatan telah menyatakan kesediannya untuk menjatuhkan tekanan ekonomi jika Korea Utara melakukan provokasi nuklir yang lebih jauh,
4. Merencanakan sanksi ekonomi dan larangan militer bagi Korea Utara. Pemerintah Bush melaporkan telah membuat rancangan sanksi ekonomi, termasuk memotong aliran bantuan keuangan dari Jepang dan sumber lainnya,
5. Memperingati Korea Utara agar tidak mengolah plutonium untuk senjata nuklir jika tidak mau diserang oleh Amerika

Kemudian kebijakan tersebut juga di dukung oleh perumus politik luar negeri yang ada pada Negara-negara maju yang menganggap

---

<sup>55</sup> Larry A. Niksch, *North Korea's Nuclear Weapons Program*, CRS Issue Brief for Congress, 23 Agustus 2003), hlm. 4-5.

bahwa negosiasi harus dilakukan dahulu sebelum kemudian mengadopsi kebijakan yang lebih keras terhadap Korea Utara.

Tujuan Kebijakan tersebut diantaranya adalah untuk:

1. Penyatuan kedua Korea yang merupakan tujuan mulia dari nasionalisme bangsa Korea dan harus dilakukan atas kesadaran rakyat kedua bangsa. Tanpa campur tangan pihak luar, penyatuan Korea dapat dicapai secara damai dan melalui negosiasi diantara keduanya. Walaupun Semenanjung Korea yang bebas nuklir merupakan tujuan terpenting yang ingin dicapai komunitas internasional, *sunshine policy* tidak menempatkan bebas nuklir sebagai prioritas utama. Selama senjata nuklir Korea Utara tidak melenceng dari penyatuan Korea, Korea Selatan tidak memiliki alasan untuk menentang rezim di Korea Utara.
2. Untuk Tujuan Kepentingan Nasional Korea Selatan dan Korea Utara serta Negara-negara yang ada di kawasan asia timur.
3. Untuk memelihara hubungan bilateral dan internasional, militer dan keamanan antar Negara.

## **D. Analisis Tanggungjawab DK-PBB Terhadap Pengendalian Nuklir di Korea Utara**

### **1. Tanggungjawab Nuklir Korea Utara**

Setelah melihat tanggungjawab DK-PBB terhadap nuklir Korea Utara, dapat dianalisis bahwa nuklir bukan merupakan hal yang sama sekali baru bagi Negara Korea Utara dan dunia internasional. Pengembangan nuklir Korea Utara sebenarnya sudah dirintis sejak kemerdekaan Korea Utara. Pengembangan tenaga nuklir kala itu dinilai sah-sah saja karena dapat digunakan sebagai kekuatan militer maupun penyokong perekonomian dibidang nuklir. Sikap DK-PBB terhadap pengembangan nuklir Korea Utara menurut penulis yang semula baik-baik saja seketika berubah total dan sejak adanya pengembangan serta uji coba nuklir di Korea Utara melanggar traktat nonproliferasi, maka DK-PBB turun tangan untuk mencegah pengembangan nuklir karena akan berdampak terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia.

Reaksi DK-PBB terhadap pengembangan serta uji coba nuklir Korea Utara menurut penulis bahwa Korea Utara melanggar resolusi DK-PBB, karena Korea Utara dinilai terlambat melaporkan kegiatan itu kepada PBB dan dengan sendirinya menentang resolusi untuk melakukan pengembangan serta uji coba nuklirnya. Akan tetapi negara Korea Utara membantah jika dikatakan melanggar resolusi DK-PBB, dengan beranggapan bahwa Korea Utara dalam pengembangan nuklirnya bertujuan untuk stabilitas perekonomian bagi negara Korea

Utara yang sedang krisis.

Disisi lain pengembangan serta uji coba nuklir Korea Utara merupakan salah satu jalan menghindari konflik dengan Korea Selatan yang di dukung langsung oleh Amerika Serikat. Alasan Korea Utara tersebut ditambah lagi dengan adanya pembuatan bahan bakar baru untuk energi.

Sesuai dengan fakta tersebut diatas, DK PBB berulang kali melakukan sidang berkaitan dengan resolusi terhadap permasalahan nuklir Korea Utara. Melalui resolusi DK-PBB yang berisi penambahan sanksi terhadap Korea Utara, karena negara tersebut dianggap tidak mematuhi resolusi. Bentuk dari peraturan sebagai tanggungjawab DK-PBB terhadap nuklir di Korea Utara adalah:

- a) Sebagai tanggungjawab DK-PBB bahwa dalam NPT, berisi tentang kewajiban Korea Utara untuk menghentikan upaya pengayaan uranium dalam rangka pengembangan nuklir.
- b) Sebagai reaksinya, Korea Utara menolak resolusi tersebut dengan alasan kegiatan tersebut dilakukan untuk damai dan kepentingan ekonomi serta tidak terdapat alasan pengembangan senjata nuklir di dalamnya.

Dalam salah satu pertemuan dalam DK PBB, Amerika Serikat juga menuduh Korea Utara melanggar resolusi tersebut karena memasok persenjataan ke luar negeri serta menggunakannya untuk militer. Didukung oleh penangkapan suatu penyimpanan yang berisi

berton-ton persenjataan asal Korea Utara. Dalam pertemuan DK PBB yang mendiskusikan pengembangan nuklir Korea Utara bahwa dengan adanya penemuan nuklir serta uji coba dan pengembangan nuklir dapat dikatakan bahwa Korea Utara telah melanggar resolusi nuklir secara internasional.

Dengan kekukuhan masing-masing negara, Amerika dengan sejumlah tuduhannya yang didukung oleh ratifikasi sejumlah resolusi oleh DK PBB serta Korea Utara melalui duta besarnya di PBB, yang menegaskan bahwa aktivitas nuklir Korea Utara adalah damai dibuktikan oleh laporan terbaru Dirjen badan Energi Atom Internasional (IAEA). Korea Utara menilai resolusi DK PBB anti nuklir Korea Utara tidak sah.

Meski Korea Utara tetap bersikukuh dengan kepentingan nuklir yang damai sementara Amerika dan Korea Selatan gencar mengirim tekanan-tekanan melalui DK PBB baik secara sepihak dinilai bersifat politis maupun penuh intimidasi. Persoalan utama terletak pada legitimasi dan kredibilitas organisasi internasional yang sepenuhnya bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap kegiatan nuklir Korea Utara tersebut yakni DK-PBB pada umumnya dan IAEA pada khususnya. Nuklir Korea Utara hendaknya tidak diinvestigasi secara terpisah, selama ini kita melihat seakan-akan PBB bertindak sendiri tanpa laporan dari badan internasional yang sebenarnya bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan nuklir di Korea Utara.

Sesuai dengan analisis penulis, bahwa uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara terdapat beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama dalam bulan Mei 1993, Korea Utara melakukan uji coba penembakan rudal Rodong-1, dengan perkiraan jarak tembak hingga 1000 km, ke arah laut Jepang. Disusul peluncuran rudal balistik melewati wilayah udara Jepang yang dinyatakan sebagai peluncuran satelit pada Agustus 1998,
- 2) Tahap ke dua pada Oktober 2004, Juli 2006 dengan roket berjenis Nodong-2 scud B dan Taepodong II dan kemudian belum lama ini adalah uji coba nuklir pada 25 Mei 2009 yang dilakukan Korea Utara, kecaman dari dunia internasional yang ditujukan pada Korut atas uji coba nuklirnya terus berdatangan hingga lahirnya resolusi-resolusi DK-PBB. Pertama adalah Resolusi 1695 Dewan Keamanan PBB menetapkan sanksisanksi yang mengharuskan semua negara mencegah pengiriman barang-barang yang berkaitan dengan rudal ke atau dari Korea Utara. Sekitar hampir tiga bulan disahkannya Resolusi Nomor 1695, pada 9 Oktober 2006 Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah tanah hingga akhirnya kembali ditetapkan Resolusi untuk Korea Utara, yaitu Resolusi 1718 yang disahkan pada 14 Oktober 2006 yang berisi tentang



larangan bagi Korea Utara melakukan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan program nuklir dan pengembangan senjata pemusnah massal termasuk pengiriman senjata dari dan ke Korea Utara.

## **2. Alasan Korea Utara Tidak Menghentikan Program Nuklirnya Sesuai Dengan Resolusi DK-PBB**

Melihat tanggungjawab DK-PBB dan dibalas dengan reaksi Korea Utara terhadap penolakan resolusi DK-PBB, maka DK-PBB memutuskan untuk menambah dan menegaskan sanksi atas Korea Utara setelah negara itu melakukan uji nuklir kedua, akhir Mei lalu. Keputusan ini diambil melalui pemungutan suara anonim dengan hasil suara bulat, Jumat 12 Juni 2009. Resolusi tersebut adalah Resolusi DK-PBB 1874, dikarenakan proyek pengembangan nuklir Korea Utara yang tetap dijalankan dan uji coba nuklir yang berlangsung pada 25 Mei 2009.

Uji coba nuklir yang berlangsung pada bulan Mei 2009 tersebut telah melanggar resolusi-resolusi sebelumnya. Desakan DK-PBB terhadap Korea Utara untuk segera mengakhiri program senjata nuklir dan peluru kendalinya malah ditanggapi Korea Utara dengan melancarkan provokasi. Penolakan dan kecaman dunia internasional terhadap program nuklir Korea Utara terutama anggota DK-PBB yang

menyetujui lahirnya resolusi-resolusi yang berisikan sanksi-sanksi yang tidak memihak Korea Utara seperti embargo-embargo ekonomi, larangan perdagangan, perundingan-perundingan dan negosiasi-negosiasi untuk membahas penghentian pengembangan senjata nuklir Korea Utara serta desakan terhadap Pyongyang untuk mencabut keputusannya menarik diri dari Traktat Non-proliferasi Nuklir (NPT) yang dilakukan Korea Utara pada tahun 2003.

Korea Utara berpendapat bahwa memiliki senjata nuklir adalah hak dari negara-negara berdaulat agar dapat mempertahankan kebebasan bangsa, keamanan dan mencegah terjadinya perang. Hal tersebut secara tidak langsung merupakan suatu penegasan bahwa Korea Utara menolak resolusi DK-PBB yang dikeluarkan pada 12 Juni 2009 di markas besar PBB, New York dengan suara bulat yaitu Resolusi DK-PBB Nomor 1874. Dimana inti dari Resolusi tersebut adalah memperkeras sanksi terhadap Korea Utara berupa pengetatan embargo senjata dan larangan-larangan baru berkaitan dengan keuangan seperti larangan ekspor import senjata.

Penulis dapat mengambil suatu analisis bahwa mengapa Korea Utara tidak menghentikan pengembangan serta uji coba nuklirnya adalah sebagai berikut:

- 1) Karena dipengaruhi oleh Kondisi politik dalam negeri; dimana sistem pemerintahan Korea Utara yang absolut membuat pemerintah bebas menentukan kebijakan tanpa mempedulikan

aspirasi rakyatnya. Termasuk sikap Korea Utara terhadap Resolusi-resolusi DK-PBB yang memperburuk perekonomian Negara tersebut.

- 2) Keamanan wilayah Korea Utara bergantung pada kekuatan militer dan senjata nuklir yang dikembangkannya. Negara-negara dengan militer yang kuat akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam pergaulannya dengan Negara lain.
- 3) Korea Utara dapat mempertahankan kedaulatan negaranya dengan memanfaatkan nuklir sebagai alat pertahanan.

Alasan tersebut yang pada prinsipnya melatarbelakangi Korea Utara tetap mengembangkan serta melakukan uji coba nuklirnya tanpa melihat ketentuan resolusi DK-PBB. Dalam reaksinya, bahwa Korea Utara tidak percaya dengan kebijakan DK-PBB yang semata hanya merugikan Negara Korea Utara.